



Tindak Tegas Pelaku Klitih!

■ Pemkot Maksimalkan Fungsi CCTV



- Pemkot memaksimalkan fungsi CCTV dan lampu penerangan jalan umum untuk meminimalkan potensi klitih.
- Semua lampu jalan umum dan CCTV akan dinyalakan, termasuk mengimbau warga pemilik CCTV di bangunannya untuk berbagi informasi soal kejadian.
- Wali Kota Yogyakarta meminta aparat menindak tegas pelaku klitih untuk memberikan efek jera.
- Upaya-upaya persuasif untuk mengurai dan mencegah pun diupayakan dengan optimal.
- Pemda DIY mengkaji pembentukan lembaga untuk mendidik anak-anak yang terlibat kenakalan remaja.
- Semua pihak sepekat klitih harus ditindak demi menjaga kondusivitas DIY dan keamanan warganya.

GRAFIS: FAUZIARAKHMAN



YOGYA, TRIBUN - Tagar #JogjaTidakAman mendadak ramai dikumandangkan warganet di media sosial Twitter Selasa (28/12).

Tagar tersebut, merupakan respons warga atas rentetan aksi *klitih* di Yogyakarta beberapa hari terakhir.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti pun angkat suara. Ia mengaku bisa memahami kegelisahan masyarakat, lantaran *klitih* yang belakangan kembali marak benar-benar sudah mengakibatkan gangguan ketertiban dan keamanan.

"Mereka kan tanpa motif, di jalanan pakai sajam (senjata tajam), sehingga menyebabkan gangguan keamanan. Makanya, muncul tagar itu di media sosial," ungkapnya, Selasa (28/12) petang.

Alhasil, dirinya pun mendorong aparat kemanan supaya berani menjatuhkan sanksi tegas untuk setiap pelaku *klitih* yang terciduk. Sehingga, bisa timbul efek jera bagi mereka agar tidak



Ketegasan aparat sangat diperlukan, ya, dalam menjaga kondusivitas wilayah, karena ini sangat mengganggu. Tidak boleh capai dengan klitih, harus diperangi.

● ke halaman 11

Tindak Tegas Pelaku

• Sambungan Hal 1

mengulangi perbuatan itu di kemudian hari.

"Ketegasan aparat sangat diperlukan, ya, dalam menjaga kondusivitas wilayah, karena ini sangat mengganggu. Tidak boleh capai dengan *klitih*, harus dipe-rangi," jelasnya.

"Lebih baik disanksi te-gas daripada pengadilan ja-lanan, itu lebih berbahaya. Kalau sampai kepegang, *njenengan* tidak bisa membayangkan apa yang terjadi," imbuh Haryadi.

Di samping itu, ia menilai, untuk memberantas *klitih*, perlu upaya-upaya yang lebih komperhensif. Termasuk dengan melibatkan orang tua, atau wali, yang dituntut sanggup menga-wasi gerak-gerik anak, saat beraktivitas di luar.

"Jelas butuh keterlibatan orang tua atau wali. Anak-anak di situasi seperti ini, ya, jangan mancing-mancing. Jalan-jalan malam hari yang tidak jelas. Enggak usah yang seperti itu, mending di rumah sajalah," pungkas Wali Kota.

CCTV

Wakil Wali Kota Yogya-karta, Heroe Poerwadi me-nyampaikan, saat ini ratus-an CCTV sudah terpasang di setiap sudut kota. Karena itu, ia meminta kepada jajar-

annya untuk melakukan pe-ngecekan, guna memastikan semuanya bekerja dengan baik agar potensi kejahatan jalanan pun bisa diredam.

"Jadi, CCTV, kemudian lampu-lampu (PJU) kita on-kan semua, supaya kegiatan-kegiatan masyarakat di se-tiap sudut bisa kita pantau. Letaknya sampai sejauh ini sudah cukup merata, jadi bisa dimaksimalkan," kata-nya, Kamis (30/12).

Heroe menuturkan, sela-ma ini peran CCTV sangat krusial dalam mendetek-si potensi-potensi *klitih* di Kota Yogyakarta. Bagaima-na tidak, setiap terdeteksi kumpulan anak-anak muda di jalanan yang terindikasi tidak punya tujuan pasti, langsung disambangi Satpol PP maupun kepolisian.

"Kita juga minta kerja sama dari pemilik CCTV, baik rumah pribadi atau per-kantoran, jika ada kasus di sekitar situ bisa segera me-nyampaikan informasi pada kami, untuk jadi bahan pe-cegahan insiden-insiden seje-nisnya," tegasnya. "Sekarang semua wilayah harus waspa-da, karena mereka itu kan motifnya acak. Sempat hilang lama, terus muncul lagi, kita tidak memahami betul itu, ya," tambah Wawali.

Lebih lanjut, Heroe me-nyampaikan, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, keme-nag, KPAI, dan aktivis-aktivis perlindungan anak untuk

membahas upaya penye-lesaian aksi *klitih* tersebut. Khususnya, mengenai pena-ngananan hukum yang tepat, sekaligus mengena.

"Kita sepakat harus ada efek jera kepada pelaku *klitih* yang tertangkap. Tapi, selain itu, upaya-upaya persuasif tetap harus dila-kukan untuk menumbuh-kan empatinya, karena me-reka rata-rata masih anak muda kan," katanya.

Salah satunya, selain pe-nanganan secara hukum, dibarengi pula dengan sanksi berupa kerja sosial, baik di panti asuhan maupun panti jompo. Dengan memberikan perhatian pada orang-orang di sana, diharapkan rasa empati itu bisa tumbuh dan terbangun di benak pelaku kejahatan jalanan.

"Ini sedang kita susun bareng-bareng. Terutama bersama KPAI dan Polresta Yogyakarta, untuk tahapan-tahapan penanganan kasus *klitih*. Sedang kita susun," ungkapnya.

Prayuwana

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, semp-at menyinggung wacana pengaktifan kembali Pra-yuwana untuk menangani masalah kejahatan jalanan remaja atau *klitih*. Prayuwana adalah sebuah pendidik-an khusus bagi anak-anak. Namun menurut Sri Sultan, pembentukan lembaga itu masih perlu dikaji ulang. "Nanti itu kita bicarakan

Kita bicara lebih jauh," kata Sultan, di Kompleks Kepati-han, Kamis (30/12).

Raja Keraton Yogyakarta ini melanjutkan, saat ini seluruh kejadian *klitih* yang dilaporkan masyarakat te-lah ditangani oleh pihak berwajib. Sultan pun berha-rap agar fenomena kenakal-an remaja itu tak terulang kembali dan berdam-pak pada sektor pariwisata.

"Yang penting kan sudah ditangkap, ya, sudah ber-proses saja dulu. Sehingga untuk meredam berita dan kekhawatiran masyarakat," terang Sri Sultan. "Yang penting masalah *klitih* tidak muncul lagi yang bisa meng-ganggu di bidang pariwisata," sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji menambahkan, kajian pembentukan Prayu-wana dilakukan untuk me-ngetahui apakah pemben-tukan lembaga itu masih relevan untuk menangani masalah *klitih* saat ini.

Sebab, perilaku rema-ja dan lingkungannya tak selalu sama dari waktu ke waktu. Bentuk penangan-annya pun harus bisa me-nyesuaikan. Aji menjelas-kan, Prayuwana merupakan pendidikan khusus untuk anak-anak nakal. Sekolah tersebut dulunya digolong-kan sebagai Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk mendidik anak berkebutuhan khu-sus. (aka/tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005